

No.	INDEKS	FOKUS	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Isian Elemen Data LPPD 2021	Capaian Kinerja	Isian Hasil Perbaikan Data	Capaian Kinerja	Catatan Hasil Klarifikasi	Panduan/Acuan	Catatan Permasalahan	Paraf
A.	INDEKS MAKRO	CAPAIAN MAKRO DAERAH	1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	69.18 69.55	0.53	69.18 69.55	0.53	Tetap			
			2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Tahun 2020	3.83	-18.28	3.83	-18.28	Tetap		Data LPPD 2020 kurang tepat	
					Angka Kemiskinan Tahun 2021	4.53		4.53					
			3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	Angka Pengangguran Tahun 2020	5.43	-2.95	5.43	-2.95	Tetap			
					Angka Pengangguran Tahun 2021	5.59		5.59					
			4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun	0.37 4.08	1002.70	16186.86 16847.01	4.08	Berubah	<a href="https://muarojambikab.bps.go.id/indicator/52/146/1/pdrrb-seri-2010-adhk-">https://muarojambikab.bps.go.id/indicator/52/146/1/pdrrb-seri-2010-adhk-</a>	Kesalahan input data ADHK bukan laju pertumbuhan	
			5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Tahun 2020	60.94	11.95	60.94	11.95	Tetap		Data LPPD Tahun 2020 kurang tepat	
Pendapatan Per Kapita Tahun 2021	68.22				68.22								
			6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020 Ketimpangan Pendapatan Tahun 2021	0.28 0.32	-13.72	0.28 0.32	-13.72	Tetap			
B.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	2,216.00	15.36	7,461.00	52.66	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi	14,427.00		14,167.00					
			1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar	37,047.00	81.06	47,773.00	99.42	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi	45,704.00		48,051.00					
			1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar	13,237.00	60.89	8,396.00	41.94	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang	21,738.00		20,018.00					
			1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	-	tdi	180.00	13.39	Berubah		Sudah mencakup data dari Kemenag	
					Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	-		1,344.00					
		KESEHATAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	202.00	0.50	202.00	0.50	Tetap		Tambahkan bukti data dukung	
					Jumlah penduduk di kabupaten/kota	402,017.00		402,017.00					
			1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	3.00	100.00	3.00	100.00	Tetap			
					Jumlah RS di kabupaten/kota	3.00		3.00					
			1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan	7,848.00	88.62	7,848.00	88.62	Tetap		Terdapat perubahan yang ekstrim baik pada elemen data pembilang maupun penyebut antara data Lppd	
					Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	8,856.00		8,856.00					
			1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	8,145.00	93.48	8,145.00	93.48	Tetap		Terdapat perubahan yang ekstrim baik pada elemen data pembilang maupun penyebut antara data Lppd	
					Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	8,713.00		8,713.00					
			1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan	7,884.00	97.93	7,884.00	97.93	Tetap		Terdapat perubahan yang ekstrim baik pada elemen data pembilang maupun penyebut antara data Lppd	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan	8,051.00		8,051.00								
		Jumlah balita di kabupaten/kota	31,172.00	100.00	31,172.00	100.00	Tetap						
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang	43,282.00	96.11	43,282.00	63.59	Berubah		Data Dukung di sesuai kan dengan data 1a (Jumlah anak 7-15 Tahun				
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	45,036.00		68,069.00								
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan	241,777.00	80.11	241,777.00	80.11	Tetap						
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	301,806.00		301,806.00								
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang	16,342.00	42.29	16,342.00	42.29	Tetap						
				Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	38,642.00		38,642.00						

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16,941.00	17.83	16,941.00	17.83	Tetap			
	1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95,023.00		95,023.00		Tetap			
	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	2,904.00	65.61	2,904.00	65.61	Tetap			
	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	4,426.00		4,426.00		Tetap			
	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan	499.00	60.85	499.00	60.85	Tetap			
	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	820.00		820.00		Tetap			
	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1,741.00	23.93	1,741.00	23.93	Tetap			
	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	7,274.00		7,274.00		Tetap			
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	2,845.00	17.70	2,845.00	17.70	Tetap			
	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di	16,071.00		16,071.00		Tetap			
	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-		-		Tetap			
	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-		-		Tetap			
	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-		-		Tetap			
	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-		-		Tetap			
	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-		-		Tetap			
	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-		-		Tetap			
	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			
	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	tdi	-	tdi	Tetap			

Ditambahkan surat keterangan tidak memiliki pantai

		TRANTIBUMLINMAS	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	5,435.00	5.15	5,435.00	5.15	Tetap		LPPD 2020 masih keliru	
			1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	105,497.00		105,497.00				Menggunakan data jumlah rumah tahun 2020	
					Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	293.00	0.28	293.00	6.35	Berubah			
					Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	105,497.00		4,611.00					
			1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	16.00	100.00	16.00	100.00	Tetap			
					Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	16.00		16.00					
			1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang	4.00	40.00	4.00	40.00	Tetap			
					Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang	10.00		10.00					
			1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	30.32	tdi		tdi	Tetap		Bukti dukung belum bisa diyakini	
					Jumlah sasaran yang seharusnya menerima								
			1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	30.32	tdi		tdi	Tetap		Bukti dukung belum bisa diyakini	
					Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
			1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	20.00	tdi		tdi	Tetap			
					Jumlah sasaran yang seharusnya memperoleh	-							
			1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	15.00	39.47	15.00	39.47	Tetap		lengkapi dengan data dukung	
		SOSIAL			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	38.00		38.00					
			1.e.7	Waktu tanggap (response time)	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan,	15.00	15.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
			1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	782.00	6.69	782.00	6.69	Tetap			
					Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak	11,692.00		11,692.00					
			1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	7,564.00	61.40	7,564.00	61.40	Tetap			
					populasi korban bencana alam dan sosial yang	12,320.00		12,320.00					
C.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	KETENAGAKERJAAN	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan	-	tdi		tdi	Tetap			
					Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di	-							
			2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	-	tdi		tdi	Tetap			
					Jumlah tenaga kerja keseluruhan	-							
			2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		tdi	16,847,010,000,000.00	83040102.92	Berubah		lengkapi dari data bps	
					Jumlah tenaga kerja			202,878.00					
			2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	95.00	100.00	95.00	100.00	Tetap			

		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan	95.00		95.00					
			2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	149.00	100.00		tdi	Berubah		lengkapi bukti dukung jumlah pencari kerja yang ditempatkan	
			2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	149.00		722.00	tdi	Tetap			
			2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	-	tdi		tdi				
					Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	-							
					Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	18.00	0.04	18.00		0.04	Tetap		
			2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	48,373.00		48,373.00					
					Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	18.00	37.21	13.00	6.60	Berubah		Data Dukung tambahan dari BPS	
					Jumlah penduduk perempuan	48,373.00		196,956.00					
		PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	41,548.00	100.50	41,548.00	100.50	Tetap			
					Jumlah kebutuhan pangan	41,340.00		41,340.00					
		PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	125.37	74.11	-	tdi	Berubah		Bukti dukung tidak tersedia	
			2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	169.15		-					
					Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		tdi	-	tdi	Tetap			
			2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan			-					
					Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	8.00	100.00	-	tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
					Luas izin lokasi yang diterbitkan	8.00		-					
			2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	951.29	95.13	951.29	95.13	Tetap			
			2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Jumlah pemerima tanah obyek landreform	1,000.00		1,000.00					
					Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan luas izin membuka tanah yang diterbitkan	12.00	100.00		tdi	Berubah		Lengkapi data dukung	
			2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	12.00							
		LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	IKLH	Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	25.00	100.00	25.00	100.00	Tetap			
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	25.00		25.00				Bukti dukung lengkapi dg tanda tangan pjbt berwenang dan stempel	
			2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	61.72	61.72	61.72	61.72	Tetap			
			2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	4,568.00	20.89	4,568.00	20.89	Tetap			
					Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	21,862.00	tdi	21,862.00	tdi	Tetap			
		ADMINDUKCAPIL	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	288,509.00	100.00	288,509.00	100.00	Tetap			
					Jumlah penduduk wajib KTP-el	288,509.00		288,509.00					
			2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	33,438.00	27.06	33,438.00	27.06	Tetap			
					Jumlah anak usia 0-17 tahun	123,552.00		123,552.00					
			2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki	114,505.00	90.86	114,505.00	90.86	Tetap			
					Jumlah anak usia 0-18 tahun	126,020.00		126,020.00					
			2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data	2.00	4.88		4.88	Tetap			
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	2.i.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah PD	41.00		41.00					
					Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria	1.00	100.00		tdi	Berubah			
					Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1.00							

		DESA	2.i.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	95.00	100.00		tdi	Berubah		Data indeks desa membangun tahun 2021	
					Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	95.00							
		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	1.54	1.54	1.54	1.54	Tetap			
			2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	44,474.00	62.14	44,474.00	62.14	Tetap			
					Jumlah pasangan usia subur	71,568.00		71,568.00					
			2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10,409.00	14.54	10,409.00	14.54	Tetap			
		PERHUBUNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	83.00	salah tolong cek	33,6	33,6	Berubah		Sesuaikan dengan data dukung	
			2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	33.60	salah tolong cek		tdi	Berubah		data dukung tidak relevan	
		KOMINFO	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	41.00	100.00	41.00	100.00	Tetap			
					Jumlah PD	41.00		41.00					
			2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara	2.00	28.57	2.00	28.57	Tetap		Bukti dukung di perbaiki	
					Jumlah layanan publik	7.00		7.00					
		KOPERASI DAN UKM	2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran	2,000.00	0.49	2,000.00	0.49	Tetap			
					Jumlah penduduk	412,052.00		412,052.00					
			2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	50.00	36.50	50.00	36.50	Tetap			
					Jumlah seluruh koperasi	137.00		137.00					
		PENANAMAN MODAL	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	-	0.00	-	0.00	Tetap		Data dukung tidak bisa di yakini, tidak ada tanda tangan dan stempel	
					Jumlah usaha mikro keseluruhan	40,000.00		40,000.00					
			2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2020	19,461,759,424.00	2978.33	618,558,059,424.00	-3.15	Berubah			
					Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	599,096,300,000.00		599,096,300,000.00					
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha		tdi	10,211.00	10.00	Berubah			
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di			102,108.00					
			2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi		tdi	150.00	0.15	Berubah			
					Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di			102,108.00					
		STATISTIK	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga	1.00	1.00		tdi	Berubah		Data dukung belum dilengkapi	
			2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	24.00	58.54	24.00	58.54	Tetap			
					Jumlah PD	41.00		41.00					
			2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	21.00	51.22	21.00	51.22	Tetap			
		PERSANDIAN			Jumlah PD	41.00		41.00					
			2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	80.00	salah tolong		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
		BUDAYA			Jumlah area penilaian	10.00							
			2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-	tdi		tdi	Tetap		Data dukung tidak relevan	
					Jumlah cagar budaya yang terdata	-							
		PERPUSTAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	0.00		tdi	Berubah			
			2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	-	0.00		tdi	Berubah			
		KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	Tingkat ketersediaan arsip	49.00	49.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	

			2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	-	0.00		tdi	Berubah			
D.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PILIHAN)	KELAUTAN DAN	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Target Produksi Perikanan Mengacu Renstra	1,516.00	tdi	1,516.00	tdi	Tetap		Data target mengacu renstra tidak ada	
		PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020	30.19	242.98	-	100.00	Berubah		Isian Wisatawan mancanegara keliru	
					Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021	103.53		-					
			3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2020	(25,200.00)	440.48	103,530.00	29.16	Berubah			
					Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	85,800.00		133,715.00					
			3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual		tdi	234.00	4.58	Berubah	234/14	14 Kamar yang tersedia di kali setahun (365)	
					Jumlah kamar yang tersedia			5,110.00					
			3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap Total PBRB harga berlaku		tdi		tdi	Tetap			
			3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	1,143.00	tdi	685,500,000.00	0.62	Berubah	Jumlah Total PAD (Realisasi)	Data PAD dari LHP BPK	
					Jumlah total PAD (Realisasi)			110,745,449,485.60					
		PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	136,463.00	6.78	136,463.00	6.78	Tetap			
					Luas Panen	20,126.00		20,126.00					
			3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2020	206.00	58.74	85.00	-242.35	Berubah		Sesuaikan dengan data dukung	
					Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	85.00		291.00					
		KEHUTANAN	3.d			-	100.00		100.00	Tetap			
		ESDM	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	-	tdi	-	tdi	Tetap			
					Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	-		-					
		PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin	13.00	100.00		tdi	Berubah		Bukti dukung tidak relevan, nilainya ekstrim dibanding dengan LPPD 2020	
					Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	13.00							
			3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	1,960,214.00	13.64	19,542.14	97.79	Berubah		Data yang di input berbeda dengan data dukung	
					Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	14,369,169.00		19,983.48					
			3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada	149.00	58.89	149.00	58.89	Tetap		Data dukung tidak ada tanda tangan pejabat penanggung jawab	
		PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera	253.00		253.00					
					Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020	4.00	24825.00	997.00	0.40	Berubah		isian di sesuaikan dengan data dukung	
					Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	997.00		1,001.00					
			3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50.00	50.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
			3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	7.00	100.00	7.00	100.00	Tetap		Data dukung pemantauan izin ditambahkan	
					Jumlah izin yang dikeluarkan	7.00		7.00					
			3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam	7.00	100.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
					Jumlah izin yang dikeluarkan	7.00							
			3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	7.00	100.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak relevan	
					Jumlah izin yang dikeluarkan	7.00							
			3.g.6	Tersedianya informasi industri secara	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	60.00	60.00		tdi	Berubah		Data dukung tidak ada	
		TRANSMIGRASI	3.h	-		1.00	100.00	-	100.00	Tetap		Tidak ada data dukung	

E.	INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		tdi		tdi	Tetap	Data yang diambil adalah Realisasi Belanja	Data dukung belum tersedia		
					Total belanja APBD (Realisasi)									
			4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD (Realisasi)	11,062,044,936,591.00	1266.93	110,745,449,485.60	tdi	Berubah				
					Jumlah PDRB Non Migas	873,136,800,000.00								
			4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Mauritas SPIP	2.00	2.00	2.00	2.00	Tetap				
			4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat	Tingkat Kualitas APIP	2.00	2.00	2.00	2.00	Tetap				
			4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan	80,946,186,445,000.00	61.01		tdi	Berubah				
					Total belanja APBD	132,674,511,313,340.00		13,267,451,131,311.40						
			4.a.5	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan 10 Tahun	9.00	9.00	9.00	9.00	Tetap				
			PENGADAAN	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar	-	0.00	-	0.00				Tetap
					Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021	146.00		146.00						
		4.b.2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	24,000,000,000.00	1.51	24,000,000,000.00	1.51	Tetap				
						1,593,000,000,000.00		1,593,000,000,000.00						
		4.b.3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui Total belanja langsung	354,408,000,000.00	26.71	354,408,000,000.00	26.71	Tetap				
						1,326,745,113,133.00		1,326,745,113,133.00						
		4.b.4		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2020	-	salah tolong cek		tdi	Berubah	Tidak ada data dukung			
					Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk	352,078,541,775.00		352,078,541,775.00						
		KEPEGAWAIAN		4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	4.62	0.71	4.62	0.71	Tetap			
						Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak	648.00		648.00					
			4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	331.00	19.09	331.00	19.09	Tetap				
						1,734.00		1,734.00						
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak	43.00	1.22	43.00	1.22	Tetap					
					3,529.00		3,529.00							
		MANAJEMEN KEUANGAN	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi		tdi	1,326,745,113,133.40	0.97	Berubah				
					Total belanja APBD dikurangi satu			1,369,025,337,321.71						
			4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi		tdi	110,745,449,485.61	salah tolong cek	Berubah				
					Total PAD dalam APBD dikurangi satu			97,314,421,591.00						
			4.d.3	Assets Management	Total Assets Management		tdi	4.00	4.00	Berubah				
			4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA		tdi	88,023,852,139.53	6.33	Berubah				
					Total belanja anggaran tahun sebelumnya			1,391,582,516,705.32						
		TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat		tdi	763,000,000.00	99.22	Berubah				
								769,000,000.00						
			4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di wensite pemda		tdi	1.00	8.33	Berubah				
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci			12.00							

Bersama-sama menyetujui hasil pelaksanaan Klarifikasi/verifikasi sebagaimana terlampir diatas,

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Ketua Teknis Tim Daerah EPPD

( ..... )

1. ....

2. ....

Inspektur Kabupaten/Kota

3. ....

( ..... )